

PASTIKAN TIDAK ADA WARGA TANGERANG TERMARJINKAN

Wali Kota Arief Minta ASN

Berikan Pelayanan Maksimal

TANGERANG (IM)- Pemkot Tangerang menggelar Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Non-permanen kepada petugas Pelayanan Umum Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Tangerang serta pengelola rumah kontrakan/apartemen dan perwakilan perusahaan di Kota Tangerang.

Wali Kota Tangerang, Arief R. Wisnansyah yang menutup acara tersebut menginstruksikan kepada jajarannya untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh orang yang tinggal di Kota Tangerang.

"Hal ini adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai pemerintah, untuk bisa mengurus dan melayani seluruh warga kita tanpa membeda-bedakan, tidak boleh ada masyarakat yang termarjinalkan," tutur Arief dalam acara yang menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Tangerang, dan Kementerian Dalam Negeri, Rabu (31/8).

"Kepada masyarakat yang KTP-nya di luar kota tapi tinggalnya di Kota Tangerang mereka harus dan wajib melaporkan dan mendaftarkan diri ke pemerintah setempat dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil," paparnya.

Lebih lanjut, Arief menjabarkan bahwa administrasi kependudukan merupakan hak sipil setiap warga negara, menjadi kewajiban bagi Pemerintah Kota Tangerang untuk mem-

berikan perlindungan hukum di antaranya memberikan fasilitas dalam bidang kesehatan, pendidikan maupun bidang sosial kemasyarakatan.

"Dalam kesempatan ini tolong disosialisasikan kepada masyarakat, kepada RT, RW, pemilik kontrakan, apartemen, bikin informasinya terkait Permendagri, ajak mereka untuk mendaftarkan diri agar kita bisa memberikan fasilitas yang terbaik untuk warga kita," jabar Arief.

Sebagai informasi, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non-permanen di wilayah Kota Tangerang guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan mendukung program GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk).

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, H. Ayi Nuryadin menjelaskan bahwa pendaftaran kependudukan non-permanen bagi warga Kota Tangerang yang memiliki KTP, KK di luar Kota Tangerang bisa mendaftarkan ke Disdukcapil Kota Tangerang. "Bisa langsung datang ke Kantor Disdukcapil atau bisa mendaftarkan langsung melalui online dengan menggunakan website sibatdukcapil.tangerangkota.go.id," tukas Plt. Kepala Disdukcapil Kota Tangerang. ● pp

PGRI Tangerang Tegas Menolak Penghapusan Tunjangan Profesi Guru

ANGERANG (IM)- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tangerang menyatakan dengan tegas menolak rencana penghapusan tunjangan profesi guru (TPG) dalam draf RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). "Kami, PGRI Tangerang menolak segala penghapusan pasal tentang tunjangan profesi untuk guru dan dosen serta berbagai tunjangan lain dalam RUU Sisdiknas," jelas Bibing Sudarman, Ketua PGRI Kabupaten Tangerang kepada TangerangNews, Rabu (31/8).

Bibing mengangap, PGRI sebagai organisasi tertua di Indonesia seolah tidak dihargai, karena sejak awal tidak dilibatkan dalam penyusunan draf RUU Sisdiknas. Menurut dia, banyak substansi penting dalam bidang pendidikan yang sebelumnya diatur baik dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang dijadikan referensi Ombudsman dihilangkan.

Pembahasan RUU Sisdiknas ini, kata dia, seharusnya masih membutuhkan kajian komprehensif, terutama dialog terbuka dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan pendidikan termasuk PGRI.

"Guru dan dosen adalah profesi, yang dalam menjalankan tugas keprofesionalnya berhak

mendapatkan kesejahteraan berupa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial," kata pria yang juga menjabat Kepala SMPN 1 Sepatan ini.

Bibing menyatakan, pihaknya menginginkan kembalinya regulasi dalam Pasal 127 Ayat 1-10 sebagaimana tertulis dalam draf versi April 2022 yang memuat tentang pemberian tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, dan lainnya.

Ia menyebut, lantaran merupakan sertifikasi, harus ada dalam norma dan batang tubuh RUU Sisdiknas, sebagai dasar untuk memberikan tunjangan profesi guru. Pemberian tunjangan profesi bagi guru dan dosen disebut merupakan sebuah kehormatan bagi pemerintah sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas profesi guru dan dosen. "PGRI akan terus konsisten memperjuangkan hak profesional yang melekat dalam diri guru dan dosen, yang sudah mulai dilecehkan oleh pemerintah," pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak agar Kemendikbudistek yang kini di bawah komando Nadhim Makarim untuk mengembalikan ayat terkait tunjangan profesi guru di RUU Sisdiknas. ● pra



IDN/ANTARA

NELAYAN MENUNTUT SOLUSI BILA HARGA BBM JADI NAIK

Nelayan menambatkan perahu di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu, Serang, Banten, Rabu (31/8). Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Banten Sabra Wijaya menyatakan para nelayan kecil akan sangat kesulitan bila pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi akibat tingginya biaya produksi selama ini yang tidak sebanding dengan hasil penjualan ikan yang terus turun, sehingga bila harga BBM dinaikkan pemerintah harus memberi solusi yang jelas supaya ribuan nelayan kecil tidak terpuruk.

TOLAK BBM BERSUBSIDI NAIK

Ribuan Pedagang Warteg Ancam Kepung Istana

Jika harga BBM bersubsidi dinaikkan, kata Rojikin, niat pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional hasilnya akan berbalik. "Kami meminta pemerintah mengkaji lagi rencana kenaikan harga BBM jenis pertalit dan solar," kata Ketua Umum HiPWin, Rojikin Manggala.

TANGERANG (IM)- Ribuan pengusaha warteg yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Warteg Indonesia (HiPWin) menyatakan menolak rencana kenaikan BBM bersubsidi. Mereka mengancam akan berdemo ke Istana Merdeka Jakarta jika pemer-

intah tetap menaikkan harga Pertalite dan Solar. "Himpunan Pedagang Warteg akan Kepung istana untuk menyampaikan aspirasi penolakan ini," ujar Ketua Umum HiPWin, Rojikin Manggala, Rabu (31/8). HiPWin, yang beranggot-

akan 20 ribu pedagang warteg, secara tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM jenis pertalite dan solar. Kenaikan harga BBM akan memperburuk pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.

"Daya beli masyarakat akan berkurang, dan risiko kebutuhan belanja akan membengkak," kata Rojikin.

Pada usaha warung makan seperti warteg, kenaikan BBM bersubsidi akan memberikan efek domino. "Berdampak pada biaya distribusi rantai pasok pasti akan naik, dan secara otomatis harga bahan pokok akan mengikuti, ini yang kami khawatirkan," ujarnya.

Keterpurukan ekonomi para pedagang karena pandemi yang berlangsung dalam tiga tahun terakhir ini belum pulih 100

persen, ekonomi rakyat masih banyak yang susah. "Dari pedagang warteg, saat pandemi penurunan omzet sampai 80 persen dan sekarang baru beberapa naik sampai 70 persen," kata pemilik 7 warteg ini.

Jika harga BBM bersubsidi dinaikkan, kata Rojikin, niat pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional hasilnya akan berbalik. "Kami meminta pemerintah mengkaji lagi rencana kenaikan harga BBM jenis pertalit dan solar."

Harga BBM belum naik saja, pedagang warteg sudah dihadapkan dengan tingginya harga kebutuhan pokok seperti telur, cabe, minyak goreng. "Saat ini daya beli masyarakat mulai naik kembali sejak pandemi. Tetapi sayangnya, hal ini tidak dibarengi dengan stabilitas harga bahan

pokok," ujar dia.

Untuk itu HiPWin mendesak pemerintah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok tersebut. Pemerintah bisa menghubungkan atau memfasilitasi petani langsung dengan pedagang. "Ini untuk memutus rantai distribusi pasokan bahan baku. Karena semakin panjang rantai distribusi harga semakin tinggi," kata Rojikin.

Saat ini, kata dia, pedagang warteg masih berada di posisi paling belakang dalam rantai distribusi. Rantai distribusi yang panjang meliputi petani ke pengepul, pasar induk, pasar tradisional dan baru ke pedagang makanan. "Kami pun saat ini melakukan upaya bekerja sama dengan petani langsung atau produsen utama," kata Rojikin. ● pp

Hotel dan Spa di Alam Sutera Dirazia Terkait Dugaan TPPO

TANGSEL (IM)- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tangerang Selatan menangkap 40 orang yang diduga terlibat prostitusi online saat razia di wilayah Alam Sutera, Serpong, pada Jumat (26/8) malam. Razia tersebut dilakukan di dua penginapan dan satu tempat spa.

Dalam razia gabungan tersebut, Tim Gugus Tugas Pidana Perdagangan Orang juga menangkap beberapa tenaga terapis, pengelola, dan pelanggan atas dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dugaan TPPO diperkuat dengan adanya tulisan promo best seller dan foto di folder tab milik manajemen spa. "Ada tulisan best seller di tab. Ada foto banyak, orang-orang tertentu yang tulisannya best seller," ujar Kepala Subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Tangsel, Hartina Hajar saat dihubungi, Rabu (31/8).

Hartina menduga label best seller diberikan kepada tabel tertentu. Namun, ia mengatakan, DP3AP2KB belum menelusuri soal dugaan tindak pidana perdagangan orang. "Manajemen enggak bahas sampai sana (tindak pidana perdagangan

orang)," kata Hartina. Dalam razia tersebut, Satpol PP mengamankan 18 pria dan 22 wanita serta menyita 503 botol minuman keras. "Mengamankan terduga prostitusi online sebanyak 40 orang, dan minuman keras sejumlah 503 botol," ujar Kepala Seksi (Kasi) Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Tangsel, Muksin Al Fahri saat dikonfirmasi, kemarin. "Pada tempat tersebut juga ditemukan barang bukti seperti alat kontrasepsi, dan tab yang disinyalir berisi foto dan video wanita yang diperjualbelikan untuk pembuatan asusila," kata dia.

Mereka yang terjaring razia didata dan dimintai keterangan. Selanjutnya, Satpol PP Tangsel mendukung mereka agar tidak mengulangi perbuatan. Apabila masih melakukan pelanggaran, mereka akan ditindak secara hukum.

Razia gabungan secara masif dilakukan Satpol PP Tangsel, TG-TPPO, P21P2A, dan DP3AP2KB sebagai upaya pencegahan dugaan prostitusi dan TPPO di wilayah Tangsel. "Menyisir beberapa tempat yang diduga rawan terjadinya tindak pidana perdagangan orang berdasarkan laporan dari masyarakat yang sudah resah dengan tempat-tempat semacam tersebut," kata Muksin. ● pp

Nelayan Lebak Hilang Ditemukan Petugas SAR dalam Kondisi Meninggal

LEBAK (IM)- Tim Pencarian dan Pertolongan (Search And Rescue/SAR) gabungan menemukan nelayan asal Lebak bernama Jarman (40) dalam kondisi meninggal dunia, setelah korban dinyatakan hilang akibat kapal yang ditumpanginya terbalik diterjang ombak di perairan Binuangun. "Kami evakuasi jenazah Jarman, warga Wanasalam, ke Puskesmas Binuangun dan diserahkan kepada keluarganya," kata Kepala Basarnas Banten Adil Triyanto di Lebak, Rabu (31/8).

Tim SAR gabungan pada hari kedua pencarian menemukan jenazah Jarman sekitar pukul 10.40 WIB sejauh 3 mil laut dari lokasi kejadian kecelakaan laut.

Kegiatan pencarian korban melibatkan personel Basarnas Banten, BPBD Lebak, HNSI Binuangun, BMKG Serang, Polairud Binuangun, TNI, Polri, relawan, warga, dan nelayan setempat. Mereka melakukan pencarian dengan pola creeping pada radius 3 mil laut dari lokasi kejadian dengan pencarian area

seluas 24 mil laut dan panjang pencarian 22.04 mil laut.

Selain itu juga melakukan pencarian dengan penyisiran pantai dari Muara Binuangun ke arah barat dan timur sejauh masing-masing 1,5 kilometer. "Dengan pola pencarian seperti itu, akhirnya tim SAR gabungan menemukan jasad Jarman dalam kondisi sudah meninggal dunia," kata Adil.

Menurut dia, kecelakaan laut yang dialami nelayan Kabupaten Lebak terjadi pada Senin (29/8) malam setelah Kapal Motor Bintang mengalami mati mesin dan kemudian diterjang gelombang besar hingga terhempas. Dalam peristiwa, dua rekan awak kapal bernama Iwan (45) dan Aming (43) selamat setelah dievakuasi tim SAR.

Adil Triyanto mengingatkan nelayan pesisir Kabupaten Lebak agar mewaspadai potensi terjadinya gelombang dengan ketinggian antara 2,5 sampai 4,0 meter. "Dengan penemuan jasad Jarman maka tim SAR dibubarkan dan kembali ke satuan masing-masing," ujar Adil. ● pra

3.000 Nakes di Kabupaten Tangerang Terima Vaksin Dosis Keempat

TANGERANG (IM)- Satuan Tugas (Satgas) Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Tangerang menyatakan, sebanyak 3.000 orang dari tenaga kesehatan (nakes) di wilayahnya telah menerima vaksinasi Covid-19 dosis tahap keempat atau booster kedua.

"Kemarin kita sudah jalan, sekarang tercatat sekitar 3.000 orang nakes yang sudah terima vaksin booster kedua," ucap Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Tangerang, dr Hendra Tarmizi kepada wartawan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Rabu (31/8).

Dia mengatakan, dari 3.000 orang yang telah menerima vaksin booster kedua saat ini, belum sepenuhnya masuk dalam target sasaran nakes di Kabupaten Tangerang. "Jadi jumlah ini belum banyak (nakes) terima vaksin, karena memang jumlah dosis yang di alokasikan dari Pemprov juga

belum banyak," kata Hendra.

Dia menyebutkan, dalam pemberian vaksin Covid-19 tahap keempat tersebut sesuai dengan Surat Edaran Kemenkes No.HK.02.02/C/3615/2022 tentang Vaksinasi Covid-19. Sehingga, pihaknya telah menargetkan sebanyak 11.300 orang nakes jadi sasaran booster kedua. "Ya memang surat edaran dari Kemenkes ini (terkait vaksin booster kedua) sudah kita terima. Dan kita sudah pendataan untuk alokasi ke 11.300 orang nakes," ujar Hendra.

Dia menuturkan, teknis pelaksanaan dalam pemberian vaksinasi dosis penguat kedua untuk ribuan sumber daya manusia (SDM) kesehatan seperti dokter, perawat, dan pegawai rumah sakit itu dilakukan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan serta di pos pelayanan vaksinasi Covid-19. Selain itu, lanjut dia, pada penyelenggaraan tahapan vaksinasi nakes, tidak ada target penyelesaian

yang ditentukan.

Karena, sejauh ini Dinkes Kabupaten Tangerang masih terfokus untuk merampungkan program Bulanan Imunisasi Anak Nasional (BIAN). "Kita tidak ada target, karena saat ini dinas kesehatan masih melaksanakan giat imunisasi anak. Mungkin, setelah itu selesai kita akan genjot vaksinasi nakes," tutur Hendra.

Berdasarkan data Dinkes Kabupaten Tangerang, capaian vaksinasi Covid-19 tahap pertama saat ini sudah melebihi dari target 70 persen. Warga yang kini telah mendapatkan dosis vaksin mencapai 2,2 juta lebih atau sekitar 80 persen dari target sasaran 2,8 juta jiwa.

Sedangkan, capaian vaksinasi dosis lengkap atau tahap ke dua sudah tercatat sebanyak 1,9 juta jiwa atau 67,5 persen. Kemudian, untuk capaian vaksinasi booster atau tahap ketiga kini baru sebanyak 653.189 ribu jiwa atau mencapai 29,7 persen. ● pp



IDN/ANTARA

SEKOLAH TERDAMPAK BANJIR DI KOTA BOGOR

Sejumlah guru dan pegawai sekolah membersihkan meja dan kursi yang basah pasca banjir di SMK Nusantara, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (31/8). Hujan deras dengan intensitas tinggi pada Senin (29/8) tersebut mengakibatkan banjir luapan sungai Ciliuar di empat sekolah di Kota Bogor sehingga kegiatan belajar mengajar diliburkan untuk sementara waktu.



IDN/ANTARA

PERSIAPAN FESTIVAL PAYUNG INDONESIA

Penari berlatih menari di depan dekorasi payung untuk persiapan Festival Payung Indonesia di kawasan Keraton Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah, Rabu (31/8). Festival yang mengangkat tema The Kingdom and Umbrella dan diikuti 81 kelompok seni dari Indonesia dan mancanegara tersebut digelar untuk melestarikan kerajinan payung tradisional sebagai warisan budaya Indonesia sekaligus meningkatkan pariwisata nasional.

Pemkot Tangerang Mulai Salurkan Bantuan Pangan Senilai Rp21,16 Miliar

TANGERANG (IM)- Pemerintah Kota Tangerang Banten mulai menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) periode Juni-Juli 2022 sebesar Rp21,16 miliar kepada 52.924 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Mulyani di Tangerang, kemarin mengatakan penyaluran BPNT sudah dilakukan sejak dua pekan lalu dengan nilai yang diterima yakni Rp200 ribu per bulan. "Penyaluran sudah dilakukan dan kepada Camat agar bisa menyampaikan program ini kepada KPM melalui pendamping sosial pada setiap wilayah," ujarnya.

Mulyani menjelaskan bahwa penyaluran bansos BPNT melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank dan Dinas Sosial.

Pihaknya juga mendorong kepada pedagang di e-warong untuk bisa meningkatkan pelayanan

kepada KPM yang akan melakukan transaksi pembelian bahan pangan. "Penerima manfaat hanya boleh belanja di e-warong dan harus dibelanjakan habis, kalau tidak dibelanjakan selama tiga bulan akan hangus," ujarnya.

Mulyani juga berharap BPNT ini bisa membantu mengurangi beban pengeluaran dan memberikan gizi yang lebih seimbang kepada para KPM, menggerakkan perekonomian masyarakat sekaligus mencegah hiperinflasi sebagai dampak pandemi yang masih mengancam dunia. "Mudah-mudahan bisa membantu menekan angka inflasi di Daerah," katanya.

Perlu diketahui, BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya. Sementara itu, Dinas Sosial Kota Tangerang mencatat jumlah anggaran yang telah dikeluarkan untuk program ini di Kota Tangerang sejak Januari - Juli 2022 yakni Rp90,58 miliar. ● pp